



MANAJEMEN PERBATASAN FOKUS INOVASI PENDIDIKAN DI PERBATASAN KALIMANTAN UTARA¹

BORDER MANAGEMENT FOCUS INNOVATION EDUCATION IN NORTH KALIMANTAN BORDER

**Lia Rosliana, Fani Heru W, Wildan Lutfie,
Kemal Hidayah dan Tri Noor Aziza**

Pusat Kajian dan Pendidikan dan pelatihan Aparatur III LAN
Jl. H.M. Ardan (Ringroad III) Samarinda
Email : lia_rosliana2000@yahoo.com

Abstract

The aims in this study was to analyze the optimization of acceleration of the settlement of issues of border management education innovation in North Borneo, and education model that can be applied at the borders between countries. Type of research is descriptive qualitative, data collection by in-depth interview, observation and documentary research. Data mining done purposively through the mechanism of indepth interviews with snowball sampling. The conclusion from this study is that there are three innovations in northern borneo border, namely : sekolah tapal batas, The Filial Svhool and undergraduate teaching. Rekomendations innovation model that can be applied at the border include the scope of innovation of teaghers, students and civil society, innovation scope of the facilities, and the scope curriculum innovation.

Keywords : *Border Management, Innovation Education, Innovation Model*

Abstrak

Tujuan dalam kajian ini adalah menganalisis optimalisasi percepatan penyelesaian isu-isu pengelolaan perbatasan inovasi pendidikan yang ada di Kalimantan Utara serta model inovasi pendidikan yang dapat diterapkan di perbatasan antar negara. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dengan cara *in-depth interview, observation* dan *documentary research*. Penggalan data dilakukan secara *purposive* melalui mekanisme *in-depth interview* dengan *snowball sampling*. Kesimpulan dari Kajian ini adalah terdapat tiga buah inovasi yang ada di perbatasan kalimantan utara yaitu: sekolah tapal batas, sekolah filial serta sarjana mengajar. Rekomendasi model inovasi yang dapat diterapkan diperbatasan meliputi inovasi lingkup guru, siswa dan sosial masyarakat, inovasi lingkup fasilitas, dan inovasi lingkup kurikulum.

Kata Kunci: Manajemen Perbatasan, Inovasi Pendidikan, Model Inovasi

¹ Naskah di terima pada 27 November 2015, revisi pertama pada 12 Desember 2015, disetujui pada 14 Desember 2015 (Dikembangkan dari Hasil Kajian PKP2A III LAN Tahun 2015)



A. PENDAHULUAN

Keberadaan Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan provinsi termuda di Kalimantan, berbatasan langsung dengan negara lain, tidaklah salah bila dikatakan sebagai daerah pinggiran yang dimaksud dalam Nawacita yang ke-3 tersebut. Pengelolaan wilayah perbatasan yang di mulai dari Kalimantan Utara berarti pula mewujudkan Nawacita yang ke-3 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

Terdapat berbagai isu penting di perbatasan antara lain: Isu Batas Negara Pertahanan dan Keamanan Daerah Perbatasan. Isu Kelembagaan, Isu Perekonomian Masyarakat, Isu Pendidikan, Isu Infrastruktur, Isu Potensi Daerah. Keberadaan berbagai isu tersebut sebenarnya telah terjadi sekian lama, akan tetapi sampai sekarang isu-isu tersebut masih relevan di kawasan perbatasan dan menjadi bahan permasalahan yang tidak kunjung terselesaikan. Diperlukan suatu inovasi untuk mempercepat penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada. Berdasarkan berbagai isu yang ada masalah pendidikan merupakan masalah dasar dan prioritas dalam pembangunan daerah perbatasan. Pada kenyataannya pendidikan di kawasan perbatasan kondisinya sangat memprihatinkan. Sebagai gerbang terdepan Indonesia pendidikan di daerah perbatasan keadaannya jauh dari ideal. Hasil pra-riiset yang dilakukan melalui wawancara kepada Kepala Bidang Pengembangan Wilayah Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur, dapat diambil kesimpulan bahwa isu pendidikan merupakan isu yang *urgent* untuk diangkat menjadi sebuah kajian di daerah perbatasan. Sebagaimana kutipan wawancaranya sebagai berikut²:

“.....Pendidikan di wilayah perbatasan keadaannya jangan dibayangkan seperti di kota-kota besar yang fasilitasnya lengkap gurunya banyak bahkan sekolah di perbatasan hanya memiliki sekolah dasar disetiap desa, sedangkan pendidikan SLTP harus pergi ke daerah kecamatan terdekat. Bagi yang mempunyai saudara yang tinggal di perbatasan atau yang mempunyai biaya bisa melanjutkan ke SLTP Kecamatan sedangkan yang lainnya ya hanya sampai setingkat SD itupun dengan keadaan yang jauh bila dibandingkan dengan kota-kota besar. Karna Pendidikan ini adalah kebutuhan dasar masyarakat maka relevan bila ingin dikaji lebih dalam”.

Hasil *desk research* menunjukkan adanya kesenjangan/*gap* di bidang pendidikan antara daerah perbatasan dan daerah perkotaan. Pendidikan sebagai modal dasar bagi pengembangan sumberdaya manusia di perbatasan ternyata kondisinya sangat memprihatinkan. Berbagai permasalahan yang muncul dalam pendidikan di perbatasan seperti masalah guru, siswa, kurikulum, fasilitas, dan lingkup sosial masyarakat merupakan masalah yang terjadi dalam pengembangan pendidikan di daerah perbatasan. Beberapa Kesenjangan yang telah berhasil diidentifikasi yang terjadi pada masalah pendidikan di daerah perbatasan adalah seperti yang terlihat dalam tabel berikut :

2 Interview dilakukan pada tanggal 13 Juli 2015, Kepala Bidang Pengembangan Wilayah Badan Pengelolaan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur di Jl. Kartini Samarinda.



Tabel 1. Kondisi Pendidikan di Daerah Perbatasan

Kondisi Saat ini	Gap/Kesenjangan
Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kekurangan kelas, sehingga ada kelas yang masuk pagi dan siang ▪ Di sebatik tengah (SMP) ruang perpustakaan, laboratorium dan asrama digunakan sebagai kelas ▪ Sudah ada asrama bagi anak-anak TKI (yayasan), misal di Desa Sungai Limau, tapi kapasitas terbatas ▪ Gedung SMA di Sebatik Tengah masih memanfaatkan gedung SD dan SMP
Pengajar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kekurangan tenaga pengajar ▪ Tunjangan dari pemerintah pusat ataupun pemda bersifat temporer
Siswa	Juga berasal dari anak-anak TKI
Lingkungan	Sebagian besar orangtua siswa bekerja sebagai tenaga kerja diperkebunan Malaysia
Kurikulum	Menggunakan kurikulum nasional 2006

Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2015

Dari Gambar di atas dapat dilihat bahwa terdapat kesenjangan/gap antara kondisi saat ini dan yang seharusnya pada masalah pendidikan di wilayah perbatasan. Dilihat dari kondisi fasilitas terdapat fenomena yang sangat memprihatinkan seperti kekurangan kelas, sehingga ada kelas yang masuk pagi dan siang. Bahkan di Kecamatan Sebatik Tengah infrastruktur SMP tidak mempunyai ruangan sehingga memfungsikan ruang perpustakaan, laboratorium dan asrama digunakan sebagai kelas. Masyarakat mendirikan yayasan-yayasan, membuat fasilitas asrama bagi anak-anak TKI yang bersekolah di Indonesia seperti di Desa Sungai Limau walaupun kapasitas masih terbatas. Kondisi lain, gedung SMA di Sebatik Tengah masih memanfaatkan gedung SD dan SMP. Dari segi pengajar/guru, kondisi di wilayah perbatasan masih kekurangan tenaga pengajar. Tunjangan

guru yang diberikan dari pemerintah pusat ataupun pemda bersifat temporer sehingga kesejahteraan guru diperbatasan kurang diperhatikan. Siswa-siswa adalah anak-anak TKI yang sebagian besar orangtua. Mereka bekerja di perkebunan di wilayah Negara Malaysia. Mereka sekolah dengan jarak berkilo-kilo meter dari perbatasan menuju tempat sekolah, bahkan kadangkala mereka tidak dapat masuk ke wilayah Indonesia bila terjadi pemeriksaan. Kurikulum 2006 diberlakukan secara nasional termasuk di wilayah perbatasan ini, padahal sebenarnya kurikulum ini kurang cocok bila diterapkan di wilayah perbatasan apalagi bila dikaitkan dengan kondisi keterbatasan yang ada.³

Begitu pentingnya inovasi di bidang pendidikan di wilayah perbatasan bagi pengembangan sumber daya manusia yang merupakan modal dasar pembangunan, serta begitu strategisnya

3 <https://www.facebook.com/search/results/?q=kecamatan%20sebatik%20tengah> diunduh 3 September 2015



peran wilayah perbatasan dalam berbagai hal, memerlukan sebuah terobosan baru yang bermanfaat bagi masyarakat daerah Perbatasan, maka penulis bermaksud membuat suatu kajian yang akan menganalisis penanganan-penanganan tentang isu-isu pendidikan yang terjadi dan memberikan satu konsep *role model* inovasi pendidikan diperbatasan yang ideal dan dapat diterapkan terutama di kawasan daerah perbatasan.

B. METODE PENELITIAN

Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *In-depth Interview*, *observation* dan *documentary research*. Penggalan data dilakukan secara *purposive* melalui mekanisme *in-depth interview* dengan *snowball sampling* pada responden-responden utama serta observasi terhadap subjek yang diteliti.

Documentary research dilakukan dengan menggali sebanyak mungkin sumber –sumber data tentang pendidikan di daerah perbatasan serta melakukan pra riset dengan mewawancarai Kepala Bidang Pengembangan Wilayah Perbatasan Badan Pengelolaan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur.

Indepth interview dilakukan dengan menggali informasi langsung kepada para responden yaitu : Sekda Kab. Nunukan, Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Nunukan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Camat Sebatik Tengah, Sekretaris Camat Sebatik Tengah, Penggagas Sekolah Tapal Batas ibu HJ Suraidah, Guru-guru dan Murid di Sekolah Tapal Batas.

Observasi dilakukan dengan mengunjungi langsung daerah perbatasan Indonesia Malaysia tepatnya di Kecamatan Sebatik Tengah yaitu : Kantor

Kecamatan Sebatik Tengah, Balai Desa Aji Kuning, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Desa, Bangunan Sekolah Formal, Sekolah Tapal Batas, Bis angkutan pelajar di perbatasan, serta kegiatan yang dilakukan mahasiswa di perbatasan.

Perpaduan pengumpulan data tersebut diharapkan mampu melengkapi semua data yang diperlukan untuk melakukan analisis secara menyeluruh.

Ruang Lingkup

Kajian ini mempunyai ruang lingkup dan batasan tertentu agar dalam penyajiannya tidak terlalu melebar atau dengan kata lain agar lebih fokus terhadap apa yang dikaji. Ruang lingkup kajian ini difokuskan pada inovasi pendidikan yang ada di perbatasan dan inovasi pendidikan yang dapat diterapkan di perbatasan.

Lokus Penelitian

Lokus penelitian adalah Kecamatan Sebatik Tengah. Penentuan lokasi ini dikarenakan hasil *desk-research* menunjukkan inovasi pendidikan berada di kecamatan tersebut.

Data Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif yang mencoba memahami realitas yang terjadi kemudian menggambarkan kondisi tersebut disertai analisis dan formulasi rekomendasi yang dapat diberikan.

C. KERANGKA KONSEP

Inovasi Pendidikan

Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh keberadaan sarana dan prasarana pendidikan yang ada berikut kelengkapannya. Peran pendidikan sebagai *prima mover* dalam proses pembangunan (Mardiana, 2006: 12). Secara fisik, pendidikan berhasil memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari segala strata dan segala bidang bagi



pembangunan. Sedangkan dari aspek non-fisik, pendidikan berhasil menanamkan semangat dan jiwa modern, yang diwujudkan dalam bentuk kepercayaan yang tinggi pada “akal” dan teknologi, demi menciptakan masa depan yang didambakan (Zamroni, 2003: 10 dalam Brahantiyo, 2007)

Selain para guru, Zakso (2010) juga menyebutkan bahwa orang tua dan masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses pembaharuan pendidikan. Bentuk utama dari keterlibatan orang tua mencakup:

1. Keterlibatan langsung di sekolah (seperti sebagai sukarelawan atau asisten)
2. Keterlibatan orang tua dalam aktivitas pembelajaran anak di rumah
3. Relasi sekolah orang tua atau masyarakat
4. Badan penasehat pendidikan

Sejalan dengan itu, Wahyudi (2014) menyebutkan bahwa pada hakekatnya hubungan sekolah dengan masyarakat dapat ditinjau dari dua dimensi, yaitu kepentingan sekolah dan kebutuhan masyarakat. Dimensi kepentingan sekolah dan kebutuhan masyarakat, hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan untuk: memelihara kelangsungan hidup sekolah; meningkatkan mutu pendidikan di sekolah; memperlancar kegiatan pembelajaran; memperoleh bantuan dan dukungan dari masyarakat dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan program-program sekolah. Sedangkan dimensi kebutuhan masyarakat, tujuan pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah: memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; memperoleh kemajuan dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat; menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan memperoleh kembali anggota-anggota

masyarakat yang terampil dan makin meningkat kemampuannya.

Adapun inovasi pendidikan adalah upaya perbaikan, perubahan, pembaharuan, terobosan, penemuan dalam bidang pendidikan guna memecahkan masalah pendidikan, sehingga pendidikan berkembang kepada yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Sehingga inovasi pendidikan dapat dinyatakan sebagai suatu ide, barang, metode, yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) baik berupa hasil invensi atau diskoveri, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan (Ibrahim, 1988)

Inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Dengan kata lain, inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode, yang dirasakan atau diamati sebagai sesuatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat), baik berupa hasil invensi maupun discovery untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan (Ibrahim, 1988:51)

Proses pembaharuan secara sederhana digambarkan Fulan (Zakso, 2010), ke dalam tiga tahapan, yaitu:

1. Inisiasi. Pada tahapan ini ada delapan hal yang perlu mendapat perhatian, yakni: eksistensi dan kualitas inovasi; akses terhadap inovasi; advokasi dinas pendidikan; advokasi para guru; agen pembaharuan eksternal; tekanan masyarakat; kebijakan baru termasuk pendanaan baik pada level pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, serta; pemecahan masalah dan orientasi birokratis. Proses inisiasi dalam pembaharuan pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor: relevansi, kesiapan dan



ketersediaan sumber-sumber. Idealnya proses inisiasi ini didasarkan atas ketiga hal tersebut, bukan salah satu atau beberapa di antaranya.

2. Implementasi. Proses pelaksanaan program inovasi bersifat lebih intrik karena melibatkan banyak orang dan karena pembaharuan itu sendiri. Banyak kebijakan yang inovatif hanya bagus pada tataran konseptual, namun sulit diimplementasikan.

Meskipun diyakini hal-hal di atas mempengaruhi kelangsungan implementasi program pembaharuan, Fullan (Zakso, 2010) menyatakan bahwa kepala sekolah tetap merupakan kunci dari keberhasilan implementasi dan kelangsungan program pembaharuan. Haknya aspirasi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, sedangkan (di pihak lain) kesempatan sangat terbatas. Belum mekarnya alat organisasi yang efektif, serta belum tumbuhnya suasana yang subur dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang dituntut oleh keadaan sekarang dan yang akan datang. Bertambahnya jumlah penduduk yang sangat cepat dan sekaligus bertambahnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang secara kumulatif menuntut tersedianya sarana pendidikan yang memadai.

Kebijakan mengenai Inovasi Pendidikan di daerah Perbatasan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014, salah satu misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 adalah terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk

berkurangnya kesenjangan antar wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan salah satunya adalah dengan mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar dan daerah rawan bencana. Adapun strategi yang direncanakan untuk kawasan perbatasan adalah dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking* sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan Negara tetangga.

Wilayah Indonesia yang terbentang luas dari ujung barat hingga timur berimplikasi pada banyaknya titik-titik wilayah perbatasan yang bersinggungan dengan negara-negara tetangga. Meskipun merupakan wilayah terdepan yang menjadi pintu gerbang negara, namun tidak semuanya wilayah tersebut mendapat perhatian yang layak dari pemerintah. Seringkali karena faktor keterbatasan sarana prasarana dan lokasinya yang relatif terpencil menyebabkan wilayah perbatasan tidak mendapat sentuhan pembangunan, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Padahal penduduk di wilayah itu juga merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk mendapatkan akses yang layak terhadap kedua kebutuhan tersebut. Tanpa pemberian akses pendidikan dan kesehatan yang memadai maka wilayah perbatasan akan tetap akan terbelakang dan termarjinalkan (Zein, 2015).

Dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010-2014 (2013:79) disebutkan bahwa dibutuhkan strategi akselerasi Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di daerah Perbatasan,



Tertinggal, dan Rawan Bencana. Pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah perbatasan dan tertinggal termasuk daerah rawan bencana, perlu dilakukan secara khusus untuk menjamin keberpihakan dan kepastian kepada masyarakat di daerah tersebut. Tuntutan keadilan dan kesatuan bangsa dan negara serta adanya konvensi internasional tentang pendidikan untuk semua, mengharuskan pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan dan kebudayaan kepada setiap warga negara dimanapun mereka berada di NKRI ini. Pembangunan pendidikan di daerah perbatasan dan tertinggal serta rawan bencana dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut.

1. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan dengan tunjangan khusus di daerah Perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana;
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan TK-SD satu atap, SD-SMP satu atap, dan sekolah berasrama di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana; dan
3. Penyediaan subsidi bagi siswa untuk mendapat pendidikan formal dan nonformal di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana.

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 361 disebutkan bahwa pemerintah pusat dengan dibantu oleh pemerintah daerah wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga. Meski demikian, implementasi untuk memenuhi hak pendidikan dan hak kesehatan bagi masyarakat perbatasan tidak semudah yang dibayangkan. Pemerintah daerah seringkali belum memiliki kapasitas yang memadai, khususnya terkait masalah kewenangan administrasi dan kompleksitas pembangunan yang melibatkan banyak

pihak. Sementara dari segi peraturan perundang-undangan juga belum seragam dan terkesan tumpang tindih. Paradigma pengelolaan perbatasan harus bergeser dari yang semula berorientasi pada *security approach* menjadi *prosperity approach* (Zein, 2015).

Beberapa masalah yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di daerah perbatasan, (Yasir, 2012) adalah :

1. Rendahnya Kualitas Sarana Fisik

Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.

2. Rendahnya Kualitas Guru

Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat. Bukan itu saja, sebagian guru di daerah perbatasan bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. Kelayakan mengajar itu jelas berhubungan dengan tingkat pendidikan guru itu sendiri. Bagi daerah perbatasan jika pendidikan guru dijadikan sebagai kelayakan mengajar, maka akan menambah banyaknya sekolah yang tidak mempunyai guru, karena tidak adanya SDM yang tersedia. Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu



keberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru.

3. Rendahnya Kesejahteraan Guru

Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan di daerah perbatasan. Dengan pendapatan yang rendah banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku/LKS. Dengan adanya UU Guru dan Dosen, barangkali kesejahteraan guru dan dosen (PNS) agak lumayan. Pasal 10 UU itu sudah memberikan jaminan kelayakan hidup. Di dalam pasal itu disebutkan guru dan dosen akan mendapat penghasilan yang pantas dan memadai, antara lain meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, dan/atau tunjangan khusus serta penghasilan lain yang berkaitan dengan tugasnya. Mereka yang diangkat pemkot/pemkab bagi daerah khusus juga berhak atas rumah dinas.

4. Kurangnya Pemerataan Kesempatan Pendidikan

Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Hal ini disebabkan karena hanya tingkat pendidikan itu saja yang tersedia. Selain itu sosial budaya masyarakat juga cukup berperan. Sementara itu layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya t e n t u a k a n m e n g h a m b a t

pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut

Best Practicess Bidang Inovasi Pendidikan di Daerah Perbatasan

Lesson Study merupakan program perbaikan kualitas pembelajaran yang disebarluaskan di Indonesia dengan sistem *Top-down*. Pemerintah bekerjasama dengan universitas terkemuka di Indonesia menyebarkan pola pembinaan guru dengan melalui pelatihan, hibah, dan pendampingan. Sebagai program rintisan, penyebarluasan pola pembinaan dan perbaikan kualitas pembelajaran melalui *Lesson Study* secara bertahap menyentuh guru-guru di berbagai wilayah, baik melalui sekolah sebagai pelaksana, MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) merupakan forum guru untuk jenjang SMP, SMA atau SMK, ataupun KKG (Kelompok Kerja Guru) merupakan forum untuk guru-guru SD. Oleh karena itu, guru-guru di daerah perbatasan juga layak untuk mendapatkan pelatihan yang sejenis. Dengan mencoba menerapkan diiringi pendampingan secara serius, bukanlah yang mustahil pelaksanaan pola pembinaan kualitas pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan lancar selayaknya di daerah lain di Indonesia (Darmayasa, 2015).

Selain *Lesson Study*, *Best Practicess* yang lain adalah Sekolah Kebangsaan, sekolah kebangsaan model ini menampung aspirasi baru tentang Pendidikan Menengah Sekolah Kebangsaan daerah terpencil, tertinggal, terluar dan daerah perbatasan dengan mencoba memodifikasi pola kurikulum, dengan model pembelajaran yaitu kurikulum pendidikan yang memiliki muatan kebangsaan seperti pembelajaran *living history* dan nilai nilai kejuangan



berbasis karakter dan *life skill* berjiwa bela negara dengan memperhatikan keunggulan lokal yang dimiliki di daerah perbatasan, sehingga dapat diterapkan sebagai suatu proses dan model pembelajaran yang layak dan sesuai dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia khususnya di daerah 3T dan perbatasan. Model ini menekankan masalah pendidikan di daerah tertinggal dan daerah Perbatasan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengembangan pendidikan menengah perbatasan daerah lain di Indonesia.

Best Practicess lain yang dilakukan oleh Asriati (2013) dengan berangkat dari kondisi pendidikan di perbatasan Kalimantan Barat seperti: masih tingginya angka putus sekolah, banya kanak yang terpaksa tidak sekolah akibat ekonomi orang tua yang tergolong tidak mampu, korban *trafficking*, korban narkoba dan atau HIV/AIDS; motivasi untuk menyekolahkan anak kurang serta fasilitas pendidikan yang sedikit dan relatif jauh dari jangkauan warga, maka Asriati (2013) mencoba membuat desain model pengembangan pendidikan menengah layanan khusus yang dikelola secara khusus dan dapat diterapkan di daerah terpencil, tertinggal, terluar dan perbatasan Indonesia. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mencapai standar mutu yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang tidak berorientasi pada kelas-kelas regular namun kurikulum baru yang mengarah pada kecakapan hidup (*life skill*) yang dapat dijadikan mata pencaharian pokok peserta didik setelah tamat.

***Best Practicess* Inovasi Pendidikan di berbagai daerah**

Adapun inovasi pendidikan yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah diantaranya adalah:

1. Inovasi Pendidikan Kota Surabaya⁴

1. Rapor Online

Inovasi rapor online ini pertama kalinya dilakukan di Indonesia yang diterapkan mulai dari jenjang SD hingga SMA/SMK sejak tahun 2014. Inisiasi inovasi ini awalnya dilakukan dengan memetakan persoalan-persoalan apa saja yang terjadi di lapangan. Hasilnya secara garis besar ada pada proses pembelajaran, cara memberikan penilaian, dan bagaimana cara melaporkan penilaian tersebut mengingat dalam Kurikulum 2013 dituntut *authentic assessment* yaitu memotret senyata-nyatanya penilaian peserta didik. Maka diterapkanlah sistem Rapor Online dengan format penilaian kuantitatif, kualitatif, mulai dari pengetahuan, keterampilan, hingga afeksinya secara berkelanjutan. "Jadi guru setelah selesai mengajar langsung input penilaiannya. Ada batas waktu input juga sehingga tidak ada penyalahgunaan nilai murid. Ini untuk membangun akuntabilitas dan transparansi penilaian anak. Spirit menggunakan rapor *online* ini adalah ingin meningkatkan layanan kepada orang tua untuk mengakses informasi yang berkelanjutan mengenai perkembangan anak dari waktu ke waktu. Rapor *Online* ini juga, kata dia, terus digunakan sebagai rekaman evaluasi peserta didik sesuai NISN untuk tiap jenjang pendidikan. satu tantangannya adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tinggi (TIK). Guru wajib menguasai TIK untuk mempermudah memasukkan evaluasi peserta didik ke dalam format Rapor *Online*.

4 <http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/2739>



2. Layanan Pendidikan dengan Sekolah Kawasan

Banyak faktor yang menjadi hambatan masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan, terutama faktor geografis. Kebanyakan sekolah unggulan negeri atau sekolah kualitas terbaik terkonsentrasi di pusat kota. Atas dasar tersebut, pemerintah kota Surabaya berinovasi mengembangkan konsep Sekolah Kawasan (*Cluster School*). Konsep Sekolah Kawasan yang diterapkan sejak tiga tahun lalu yaitu sejak Tahun 2011 dan ternyata mampu meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan. Konsepnya adalah mengkloning sekolah bagus di kawasan-kawasan selain pusat kota. Contohnya, SMA 5 Surabaya sebagai sekolah unggulan dikloning di kawasan barat, timur, selatan, utara, dan tengah. Kloning ini adalah dalam segi kualitas, potensi, pendidik, sarana prasarana sehingga mempunyai standar yang sama dengan sekolah unggulan. Untuk menerapkan konsep Sekolah Kawasan, Dinas mencari sekolah yang strategis di masing-masing kawasan dan mempunyai potensi yang baik mulai jenjang SD sampai dengan SMA. Adapun pola kerjanya adalah pertama, untuk menjaring input yang baik, peserta didik hanya diberi kesempatan memilih satu sekolah di luar kawasan tempat tinggalnya (lintas kawasan). Kedua, dari pola perekrutan dan pembinaan pendidik, untuk membentuk sekolah berkualitas maka dibutuhkan guru yang berkualitas juga, sehingga dilakukan mutasi

untuk memilih guru yang bagus. Guru dipotret melalui uji kompetensi, dan diberi ruang melalui diklat dan pengembangan diri sehingga memenuhi kualifikasi untuk mengajar di sekolah kawasan. Kepala Sekolah juga diseleksi dan menandatangani kontrak kinerja dalam empat tahun untuk berkomitmen meningkatkan kualitas sekolah yang ditunjuk sebagai Sekolah Kawasan.

2. Inovasi Pendidikan Kota Blitar⁵

Pemerintah Kota Blitar melakukan distribusi gadget bagi seluruh siswa di Kota Blitar dalam rangka inovasi pembelajaran di bidang pendidikan. Sehingga diharapkan seluruh pembelajaran tidak hanya menggunakan media buku tetapi juga media virtual. Tahap pertama, Pemerintah Kota Blitar telah menyiapkan 525 tablet. Prioritasnya adalah siswa kurang mampu dan berprestasi. Sisanya akan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2015. Ditargetkan, akhir tahun 2015 ini seluruh siswa di semua jenjang sudah bisa mendapat tablet.

Inovasi Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 telah melakukan inovasi di bidang pendidikan dengan meluncurkan situs Rumah Belajar. Situs Rumah Belajar milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut diatas dapat diakses di alamat: <http://belajar.kemdiknas.go.id>, dimana situs ini dirancang menjadi rumah belajarnya para insan pendidikan, baik guru maupun peserta didik. Portal ini merupakan salah satu inovasi pendidikan

5 <http://www.jawapos.com/baca/artikel/13861/Inovasi-Pendidikan-Wali-Kota-Blitar-Samanhudi-Anwa>



dimana untuk belajar, peserta didik maupun guru bisa mengakses dimanapun. Di portal Rumah Belajar ini terdapat bermacam konten antara lain RPP, Materi, Bahan pembelajaran interaktif, Modul, Forum guru, Forum Siswa, Bank soal dan lain lain. Konten

tersebut dikelompokkan per jenjang pendidikan yaitu SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan Perguruan Tinggi. Di Rumah Belajar juga terdapat fasilitas *live streaming* TV Edukasi dan Radio Suara Edukasi.



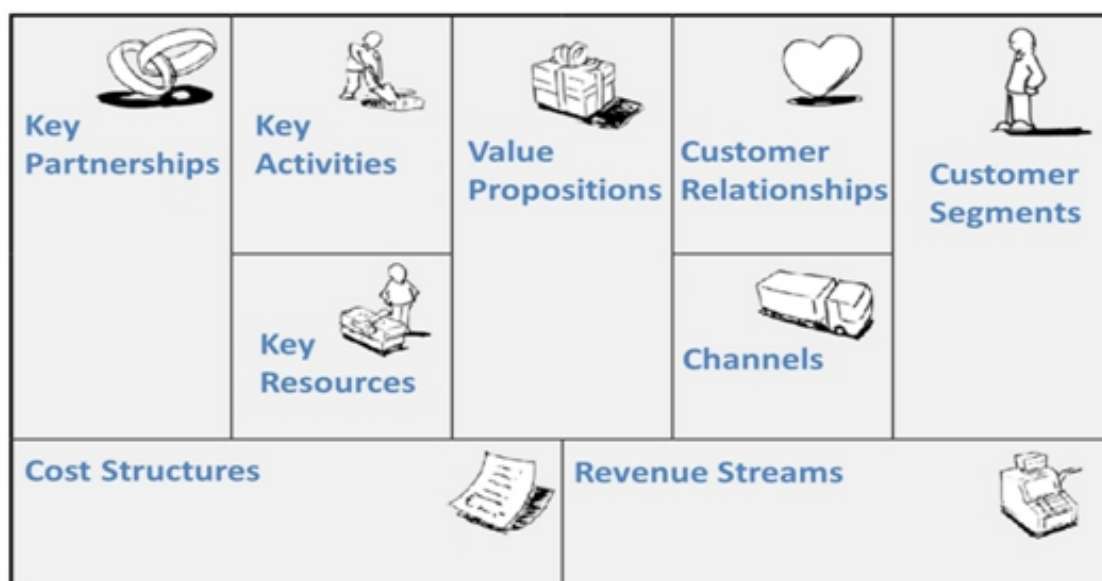
sumber: www.belajar.kemdiknas.go.id, 2015

Gambar. 1 Situs Rumah Belajar

Model Canvas Template Inovation

Model Canvas Template Inovation digunakan untuk memudahkan dalam memahami sebuah organisasi. Model ini diadopsi dari *Business Model Generation*: (Osterwalder, A. & Pigneur, Y., 2010) (dalam Deputi Administrasi Negara.2015). Model Canvas tersebut merupakan alat

bantu untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan merancang model bisnis (baca: urusan / tuisi / program dan kegiatan organisasi). Model *Canvas* juga merupakan Model bisnis yang menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai.



Sumber : Osterwalder, A. & Pigneur, Y., 2010

Gambar. 2
Model Canvas Template Innovation

Adapun komponen dalam Model *Canvas Innovation* ini terdapat 9 komponen yaitu: segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran, hubungan pelanggan, timbal balik, sumber daya utama, kegiatan utama, kemitraan utama dan struktur biaya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 361 disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dengan dibantu oleh Pemerintah Daerah wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga, tak terkecuali pembangunan di bidang pendidikan. Motivasi untuk memajukan pendidikan di tengah keterbatasan dapat memacu tumbuhnya ide kreatif atau inovasi yang dapat diaplikasikan sesuai kebutuhan dengan tujuan untuk memperoleh hal yang lebih baik dalam bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, maka dapat dilakukan pemetaan model inovasi yang terdapat di Sebatik Tengah. Terdapat tiga model

inovasi pendidikan, yaitu Sekolah Tapal Batas, Sekolah Filial dan Sarjana Mengajar. Adapun tiga model tersebut dapat dilihat pada pembahasan berikut :

1. Sekolah Tapal Batas

Sekolah Tapal Batas yang berada di Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan. Sekolah Tapal Batas ini berdiri karena bentuk kepedulian terhadap semangat anak – anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menimba ilmu di perbatasan Indonesia – Malaysia dan berada pada kawasan Kecamatan Sebatik Tengah. Permasalahan pendidikan juga terdapat pada anak – anak TKI yang harus menempuh jarak berkilo – kilo meter untuk dapat sekolah di Kecamatan Sebatik Tengah.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, 29 Sept 2015, Dinas Pendidikan Kab. Nunukan mengatakan :

“ ...masalah anak-anak TKI yang ada di Sebatik tengah yaitu anak-anak TKI yang sekolah di indonesia..ya sebetulnya itu pemerintah pusat harus memperhatikan.ya tolonglah di



bantu karna ini anak bangsa lo ya...ini bukan anak nunukan karena rata-rata yang jadi TKI itu bukan dari nunukan ya tidak adalah orang yang lahir di nunukan terus jadi TKI itu tidak ada ..rata-rata dari jawa dari NTT ataupun dari sulawesi..ini maslah nasional. Tapi sudah ada perhatian namun sampai sekarang realnya belum ada.Dengan kehadiran Jokowi kemarin ya ke sebatik tengah itu ya ada harapan lah. Walaupun belum ada real nya sampai sekarang.“

Kebutuhan pendidikan bagi anak-anak TKI juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Nunukan. Meskipun ini adalah isu nasional dimana pemerintah pusat seharusnya punya perhatian yang lebih terhadap pendidikan anak-anak TKI di perbatasan. Permasalahan di perbatasan sebatik adalah permasalahan bagaimana nantinya kedepan keberadaan TKI dapat memberikan kontribusi pada pembangunan di sebatik.Dengan begitu perlu adanya perhatian dalam penanganan pendidikan pada anak-anak TKI yang nantinya sudah pasti punya masa depan. Membangun Sebatik berarti juga peduli pada permasalahan yang ada di Sebatik termasuk permasalahan pendidikan bagi anak - anak TKI.

Wawancara dengan Camat Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan, 29 Sept 2015, RSUD Kab. Nunukan :

“ ...Makanya selalu kita sentuh karna nanti mereka akan tinggal di Sebatik. Kalau mereka pilhan tinggalnya di Sebatik maka mereka harus berkontribusi kepada pembangunan Sebatik bukan malah menjadi “beban “ Sebatik. Jadi adaptasi di Sebatik itu mereka akan lebih cepat

daripada pergi ke kampung halamannya yang harus membangun dari awal lagi. Untuk membangun kesadaran pendidikan misalnya...Goal kami ya memang ada peningkatan pendidikan tetapi sebelum itu kita harus meyakinkan dengan action sehingga mereka percaya dengan apa yang kita katakan... “

Pendekatan yang dilakukan adalah membangun kesadaran pendidikan, dengan begitu tujuannya adalah peningkatan pendidikan. Namun untuk meningkatkan pendidikan perlu membangun kepercayaan sehingga semua yang dilakukan tujuannya adalah untuk kepentingan bersama yang hasilnya nanti akan dinikmati bersama juga.

Keberadaan Sekolah Tapal Batas bukanlah merupakan sekolah formal atau semi formal. Sekolah ini berdiri dengan tujuan sebagai tempat persinggahan bagi anak – anak TKI yang kesekolah dengan berjalan kaki dengan jarak tempuh berkilo-kilo meter. Di sekolah ini pada anak-anak TKI berproses untuk mendapatkan pendidikan tambahan atau bahkan mengulang kembali pelajaran yang di terima di sekolah formalnya dengan didampingi sukarelawan yang merupakan bagian dari Sekolah Tapal Batas. Dari sisi pendanaan, Sekolah Tapal Batas menerima sumbangan dari Lembaga Dompot Dhuafa, dan juga zakat profesi dari karyawan yang dikumpulkan untuk membantu kegiatan-kegiatan di Sekolah Tapal Batas. Sekolah ini berada dibawah naungan Yayasan Arrasyid yang dikelola oleh seorang Bidan.Dan karena kepedulian masyarakat sekitar yang kemudian Sekolah Tapal Batas masih berdiri hingga saat ini.

Wawancara dengan Camat Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan, 30 Sept 2015, Kantor Camat Sebatik Tengah Kab. Nunukan :



“ ...Anak-anak TKI yang sekolah diindonesia bersekolah di sekolah tapal batas, itu tadinya bukan sekolah rumah warga yang terbengkalai lalu kita buatlah semacam sekolah.penggagasnya dari seorang bidan yang mau berbakti di sini kita bantu buat tempat seadanya. Dibantu oleh dompet dhuafa dan juga kita kan punya dau zakat profesi karyawan kita kumpulkan kita jadikan untuk membantu kegiatan kegiatan seperti itu kita salurkan kepada pelatihan tpa, kegiatan kaligrafi dll.Sekolah tapal batas ini ada yang dari yayasan Arrasyid punya bidan tadi.dan juga warga sekitar yang mau jadi gurunya secara sukarela... “

Hal yang berbeda dari Sekolah Tapal Batas adalah ketersediaan makanan dan tempat istirahat bagi anak – anak TKI yang singgah di sekolah tersebut.Mereka dapat ganti baju, makan dan istirahat di Sekolah Tapal Batas, bahkan mereka juga dapat menginap jika kondisi perjalanan pulang menuju kerumah tidak memungkinkan untuk dilalui, dalam hal ini seperti hujan deras dimana kondisi jalan sangat berlumpur.

Namun tidak semua kecamatan di wilayah perbatasan memiliki kondisi yang sama dengan Kecamatan Sebatik Tengah dengan permasalahan anak-anak TKI. Tentunya di wilayah perbatasan yang lain juga perlu mendapatkan perhatian yang lebih untuk aspek pendidikan karena wilayah perbatasan sangat minim akses teknologi dan informasi, kecuali sudah masuk wilayah Malaysia. Karena wilayah perbatasan Malaysia sudah lebih baik dari pada wilayah perbatasan Indonesia dalam hal ini di Kabupaten Nunukan.

Sekolah tapal batas yang digagas oleh masyarakat ini sebetulnya menjawab

dari permasalahan ketiadaan sekolah untuk anak-anak TKI yang berada di Kamp Perusahaan-perusahaan di wilayah Malaysia. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan mereka merupakan permasalahan tersendiri, anak- anak TKI yang tinggal di kamp tersebut merupakan anak-anak Indonesia yang haus akan pendidikan. Keberadaan Sekolah tapal batas yang di gagas oleh masyarakat dengan melihat banyaknya anak TKI yang semangat untuk mencari ilmu merupakan hal yang ironis karena pada hakekatnya pendidikan adalah hak seluruh warga negara dimanapun berada. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 361 disebutkan bahwa pemerintah pusat dengan dibantu oleh pemerintah daerah wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga. Pembangunan Kawasan perbatasan dalam hal ini sangatlah luas cakupannya. Pembangunan pendidikan merupakan pembangunan dasar yang perlu diperhatikan agar sumber daya manusia Indonesia di perbatasan dapat mendapatkan pendidikan yang layak demi kemajuan pembangunan.

Hal ini diperkuat juga dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010-2014 (2013:79) disebutkan bahwa dibutuhkan strategi akselerasi Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di daerah Perbatasan, Tertinggal, dan Rawan Bencana.

Model sekolah tapal batas ini dapat dikategorikan inovasi karena sesuai dengan teori Scott D. Anthony (2013) yang menyatakan bahwa inovasi adalah Sesuatu yang berbeda dan berdampak. Sekolah tapal batas ini berbeda karena sekolah diperuntukkan bagi anak-anak TKI yang berada di perbatasan dengan sistem pendidikan informal dengan materi dasar baca tulis hitung (Calistung), serta pengajaran agama, dan keterampilan yang belum ada sebelumnya di daerah perbatasan, berdampak jelas sangat



membantu pendidikan anak-anak TKI untuk mendapatkan ilmu yang diperlukan.

2. Sekolah Filial di Wilayah Perbatasan

Keberadaan sekolah filial tidak dapat dilepaskan pada permasalahan pendidikan yang pada dasarnya adalah sekolah yang sudah kelebihan kuota siswa sehingga tidak mampu lagi menampung jumlah siswa sehingga membutuhkan pembentukan sekolah filial. Namun untuk kondisi wilayah perbatasan masih memungkinkan pembentukan sekolah filial atas dasar sekolah yang sulit dijangkau oleh masyarakat. Meskipun keberadaan sekolah filial nantinya akan terbentur dengan ketersediaan guru di lokasi-lokasi sekolah filial.

Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, 29 Sept 2015, Dinas Pendidikan Kab. Nunukan :

“ ...Sebenarnya membentuk sekolah filial itu untuk sekolah yang overload. Tapi sekarang jauhnya dari jangkauan dan kondisinya. Pada dasarnya memungkinkan, tapi guru lagi. SD dan SMP saja gurunya belum memenuhi. Artinya lagi memang daerah kami susah dijangkau... “

Keberadaan sekolah filial dirasa perlu untuk difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Perlu ada penyebaran informasi di wilayah perbatasan mengenai bagaimana mekanisme pembentukan sekolah filial. Kebutuhan sekolah filial di wilayah perbatasan tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat di wilayah perbatasan masih kurang mendapatkan informasi mengenai bagaimana dan mekanisme pembentukan sekolah filial.

Wawancara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, 29 Sept 2015, Dinas Pendidikan Kab. Nunukan :

“ ...terutama perusahaan yang mendirikan sekolah tadi itu, untuk anak pegawainya. Harusnya perusahaan itu bikin yayasan dan yayasan itu kan menaungi dia. Tapi diamlakukan itu tidak melapor. Mendirikan sekolah itu kan banyak syarat, kan pasti kita data. Dalam kasus ini setelah diminta datanya justru malah data tidak dikasih. Kalo datanya tidak ada, maka dapodik itu kan tidak bisa diinput. Itu kan sistem... “

Beberapa pendirian sekolah filial justru menjadi permasalahan baru karena sebagian besar sekolah filial yang dibentuk masih belum memenuhi persyaratan. Dimulai dari persyaratan pembentukan yayasan yang belum difasilitasi oleh pihak-pihak tertentu karena lebih berkepentingan untuk proses belajar mengajarnya saja hingga kesiapan data untuk siswa yang mengikuti sekolah filial yang masih banyak dipertanyakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, karena masih ditemukan di beberapa sekolah filial yang dilaporkan ada kegiatannya namun data siswanya ketika diminta tidak ada. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri mengenai penanganan sekolah filial di wilayah perbatasan.

Wawancara Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan (29-9-2015; Dinas Pendidikan Kab. Nunukan) :

“ ...Tapi kita sudah usahakan melalui kepala desa dan camat juga apabila ada sekolah segera dilaporkan sehingga kami bisa mendata. Yang sudah ada ini kita sedang mencari solusinya apakah disatukan ke sekolah induk terdekat ataupun buat penyetaraan itu masih dibicarakan agar ada



penyelesaiannya.kalau filial kita welkam saja yang penting dari awal didaftarkan.Filial itu sekolah yang menginduk ke sekolah induknya yang negeri kalau dulu itu seperti smp terbuka ya seperti kelas jauh lah.ini sudah 3 tahun berjalan ya...nanti kita lihat bagaimana kementerian mudah-mudahan bisa menerima ini..kalau tidak ya terpaksa mereka harus mengulang kelas 1 kalau tidak ya kita jadikan paket.aman sudah itu saja solusinya... “

Berbagai pendekatan telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan melalui Kepala Desa dan Camat.Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi keberadaan sekolah filial yang terus bermunculan tanpa koordinasi dan tidak memenuhi persyaratan pendidikan.Ini merupakan bentuk perhatian Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan terhadap penyelenggaraan sekolah filial yang sebenarnya dapat menjadi solusi atas permasalahan pendidikan di wilayah perbatasan.

Keberadaan sekolah filial sebetulnya menjawab dari sulitnya letak geografis desa-desa di perbatasan untuk menjangkau sekolah “resmi” yang didirikan oleh pemerintah. Keberadaan sekolah filial sangat membantu pendidikan di desa-desa terpencil yang tidak terjangkau oleh akses infrastruktur. Permasalahan yang timbul adalah dikarenakan kurangnya kesadaran dari pendiri-pendiri sekolah filial ini untuk mendaftarkan sekolahnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten. Hal ini dapat dimaklumi karena kondisi geografis yang sulit maka kelompok-kelompok belajar ini tumbuh berkembang menjadi sekolah-sekolah filial yang menginduk pada sekolah “resmi terdekat”.Pendaftaran sekolah filial sangat penting bagi siswa yang ingin melanjutkan sekolah ke

jenjang yang lebih tinggi. Sehingga siswa-siswa yang mengikuti sekolah filial dapat melanjutkan ke jenjang sekolah di atasnya dengan nomor induk siswa yang telah terdaftar. Untuk menangani hal ini sudah sepantasnya Dinas pendidikan mencari solusi agar sekolah-sekolah ini terus berjalan, dan siswa dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan diakui keberadaannya oleh pemerintah. Dinas pendidikan melalui Pengawas Sekolah dapat mendata sekolah-sekolah filial yang berada dikawasan pengawasannya. Melakukan sosialisasi dan kerja sama dengan pihak kecamatan untuk memberikan pembinaan kepada sekolah-sekolah filial ini agar keberadaannya setara dan tidak tertinggal dengan sekolah-sekolah lainnya.

Bagaimanapun Sekolah Filial adalah solusi dari permasalahan pendidikan di perbatasan. Bila kita melihat kembali pada undang-undang bahwa pendidikan adalah hak semua orang, maka keberadaan sekolah filial ini adalah jawaban atas hal tersebut. Sekolah filial ini sudah sesuai dengan arah kebijakan pendidikan, tinggal pembinaan dan pengawasan pelaksanaannya yang lebih ditingkatkan agar *quality control* dapat terjamin bagi kemajuan pendidikan di perbatasan.

3. Sarjana Mengajar

Program sarjana mengajar yang digulirkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Nasional beberapa tahun belakangan, merupakan solusi atas kekurangan tenaga pendidik di daerah perbatasan. Para Sarjana dengan skill dan kemampuan serta motivasi yang tinggi yang sebelumnya sudah dibekali dengan pengetahuan tentang daerah perbatasan, turun langsung ke daerah-daerah perbatasan yang sulit dijangkau. Program Sarjana Mengajar ini cukup menginspirasi masyarakat di daerah perbatasan agar dapat mengenyam pendidikan yang lebih baik. Sejalan



dengan apa yang diungkapkan oleh Zein, 2015 yang menyatakan bahwa tanpa pemberian akses pendidikan dan kesehatan yang memadai maka wilayah perbatasan akan tetap akan terbelakang dan termarginalkan, maka program sarjana mengajar ini merupakan inovasi yang sebaiknya terus dilaksanakan oleh pemerintah, tentunya dengan terus melakukan evaluasi setiap pelaksanaannya agar dapat diperbaiki.

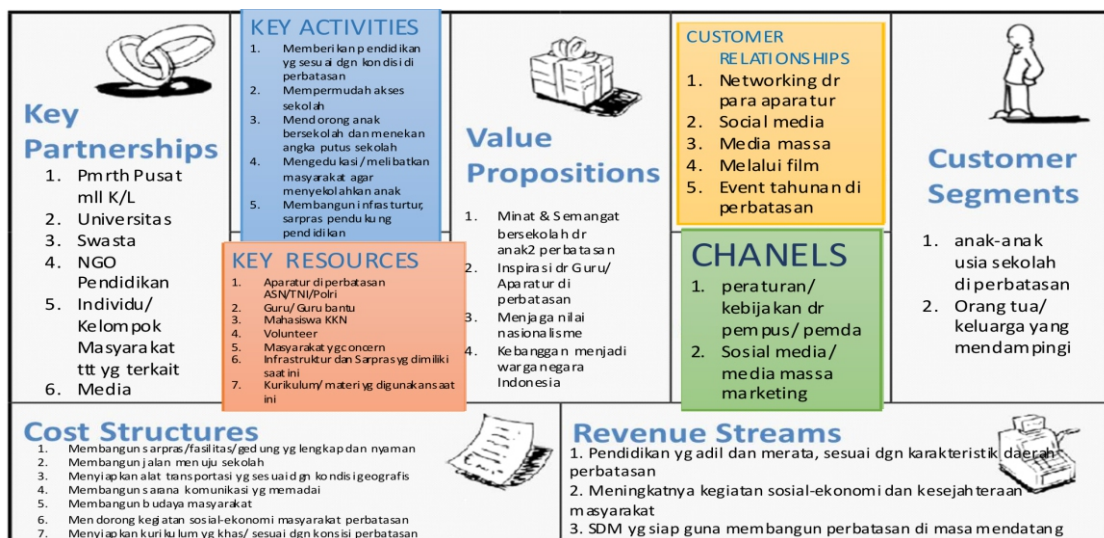
Wawancara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, 29 Sept 2015, Dinas Pendidikan Kab. Nunukan :

“ ...dan di Krayan itu kan kami tempatkan SM3T, dan guru ini mengajar 1 tahun dan nanti ganti lagi. Dan anak - anak ini kan memang pilihan, IP 3 keatas dan artinya anak ini orang pintar dan dia mengajar akan ada hasilnya. Kalo saya melihat nilainya naik karena ada SM3T untuk di wilayah Krayan. Jadi kemaren rangking 1 sampai 20 itu 17nya adanya di Krayan lainnya dari wilayah 3 di daerah Sebuku. Dan ini artinya ada peningkatan. Terkait personil SM3T yang kemaren kami dapat 90 orang. Dan itu disebar untuk daerah

pedalaman dan perbatasan. Dan ini sangat berpengaruh cuma menurun. Tahun ini 77 orang masuk. Yang 95 orang tadi berasal dari UNJ (Jakarta) dan Universitas Cendana NTT... “

Ini adalah program pemerintah pusat yang sejalan dengan kebutuhan pendidikan di wilayah perbatasan. Program ini juga perlu dijaga oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk dapat terus berlangsung di wilayah perbatasan. Dan jika memungkinkan perlu dilakukan pengembangan program sehingga dapat memberikan dampak atas pembangunan pendidikan di wilayah perbatasan secara luas.

Berdasarkan ketiga model di atas, maka dapat dianalisis berdasarkan model *Canvas Template Inovation* (Osterwalder, A. & Pigneur, Y., 2010) terhadap permasalahan yang ada dan solusi/pemecahan masalah inovasi Pendidikan yang dapat dilakukan di daerah perbatasan. *Canvas Template Inovation* terdiri dari *Key Partnerships*, *Key Activities*, *Key Resources*, *Cost Structures*, *Customer segment*, *Value propositions*, *Channels*, *Customer Relationship*, *Revenue Streams*.



Osterwalder, A. & Pigneur, Y., 2010

Gambar 3. Canvas Template Inovation



Customer segment menjelaskan siapa saja target-target inovasi yang akan kita berikan kepada masyarakat/*stakeholder* sebagai “pelanggan” kita, mendeskripsikan segmen pelanggan akan menentukan apa produk dan jasa yang nantinya akan kita berikan kepada pelanggan. Dalam *Canvas Template Innovation* dapat dilihat bahwa *customer segments* dalam inovasi pendidikan di wilayah perbatasan adalah :

1. Anak-anak usia sekolah yang memerlukan pendidikan baik formal maupun formal
2. Orang tua/keluarga yang mendampingi anak-anak usia sekolah itu sendiri.

Mereka adalah usia-usia produktif yang selayaknya mendapatkan pengetahuan dan pendidikan yang layak di daerah perbatasan. Fakta yang ditemui dilapangan dapat ditemui di daerah perbatasan seperti anak-anak TKI yang perlu mengenyam pendidikan. Orang tua/ keluarga yang mendampingi anak-anak usia produktif pun memerlukan pengetahuan dan pendidikan yang baik. Bila dilihat TKI yang bekerja di luar negeri adalah buruh-buruh pabrik yang bekerja kasar karna tidak dapat pendidikan dan pengetahuan serta skill yang baik agar menjadi nilai tawar yang tinggi dalam bekerja.

Value propositions adalah nilai nilai yang dapat mengilhami ataupun menginspirasi yang dapat dikembangkan pada siswa ataupun anak didik diantaranya adalah :

1. Minat dan semangat bersekolah
2. Menjaga nilai nasionalisme
3. Kebanggaan menjadi warga negara Indonesia, dll

Keadaan yang ditemui diperbatasan anak-anak yang bekerja di sekolah tapal batas contohnya, mempunyai minat dan semangat tinggi untuk belajar. Mereka rela menempuh jarak berkilo-kilo meter dengan lama waktu berjalan menuju

sekolah sampai dengan kurang lebih 2 jam ini menunjukkan betapa besar minat dan semangat anak-anak untuk dapat bersekolah. Untuk menjaga nilai nasionalisme anak-anak diajarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Aspek *channel* yaitu bagaimana cara agar produk, jasa, nilai tambah inovasi yang kita ciptakan ini disadari dan sampai ke tangan *customer/ masyarakat* sesuai dengan apa yang kita janjikan dalam *Canvas template Innovation* adalah:

1. peraturan/ kebijakan dari pemerintah pusat/ pemda
2. Sosial media/ media massa marketing

Faktanya di lapangan peraturan/ kebijakan dari pemerintah pusat/ pemda belum seluruhnya menyentuh sampai dengan masyarakat, contohnya permasalahan anak-anak TKI yang belum dikelola dengan baik. Pemerintah Kab. Nunukan menganggap bahwa itu adalah permasalahan pusat karna para TKI adalah bukan warga nunukan, akan tetapi realitanya berada di lingkungan wilayah nunukan sehingga peraturan/ kebijakan yang jelas dari pemerintah pusat/ pemda untuk penanganan kasus tersebut sangat diperlukan. Keberadaan kecamatan di perbatasan yang merupakan aparat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat perbatasan menjadi *channel* yang sangat penting. Sosial media/ media masa adalah ujung tombak dalam *delivery* inovasi yang dilakukan keberadaan media sosial seperti Facebook, koran lokal yang memberitakan perbatasan dan juga RRI perbatasan merupakan media *channel* yang efektif dan penting bagi masyarakat perbatasan.

Aspek *Customer Relationship* penting untuk menjaga hubungan dengan pelanggan / *stakeholder* agar pelanggan merasa nyaman dan dekat, yaitu dengan cara

1. Networking dari para aparat
2. Social media
3. Media massa



4. Melalui film
5. Event tahunan di perbatasan

Untuk menjaga hubungan stakeholder *networking* dari aparaturnya sangat penting, kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di beritakan melalui facebook maupun sosial media lain juga media massa tentang perbatasan, film dokumenter seperti sekolah tapal batas eagle award, serta even-even tahunan yang sering diadakan dapat memperkuat dan menjaga hubungan dengan stakeholder dan masyarakat.

Aspek *Key Partnerships* dalam inovasi diperlukan karena kita tidak bisa melakukan semua sendirian, namun pasti akan berhubungan dengan partner lain, dalam *Canvas template Innovationkey partnershipnya* adalah

1. Pemerintah
2. Universitas
3. Swasta
4. NGO Pendidikan
5. Individu/Kelompok Masyarakat tertentu yg terkait
6. Media

Keadaan di perbatasan pemerintah terbawah kecamatan dan perangkat desa mempunyai peran penting dalam pembangunan pendidikan di masyarakat, kehadiran anggota-anggota TNI , pengawas pendidikan, serta tenaga kesehatan yang ditempatkan di masyarakat sangat membantu dalam inovasi pendidikan diperbatasan. Keberadaan Mahasiswa –mahasiswa yang sedang KKN ataupun sarjana mengajar memberikan inspirasi bagi penduduk untuk terus mencapai pendidikan tertinggi. Pihak swasta seperti Dompot dhuafa dan juga program CSR dari perusahaan-perusahaan swasta sangat membantu. Kehadiran tokoh masyarakat seperti bidan Suraidah yang mendirikan sekolah tapal batas juga

menjadi key partnership dalam inovasi di pendidikan. RRI perbatasan menjadi penghubung masyarakat perbatasan untuk mempertebal bela negara dan nasionalisme ditengah keberadaan *station* radio-radio swasta Malaysia yang banyak didengar masyarakat perbatasan.

Aspek Key Activities adalah kegiatan, aktivitas atau proses kunci yang ada di inovasi , yaitu :

1. Memberikan pendidikan yang sesuai dgn kondisi di perbatasan
2. Mempermudah akses sekolah
3. Mendorong anak bersekolah dan menekan angka putus sekolah
4. Mengedukasi/ melibatkan masyarakat agar menyekolahkan anak
5. Membangun infrastuktur, sarpras pendukung pendidikan

Dalam kenyataannya aktifitas/ kegiatan tersebut masih berjalan dengan sangat lambat, perlu progres yang lebih cepat apalagi bila dibandingkan dengan negara tetangga yang jauh melangkah didepan.

Aspek *Key Resources* merupakan sumber daya kunci atau utama yang diperlukan dalam menciptakan nilai tambah / inovasi, yaitu:

1. Aparatur di perbatasan ASN/TNI/Polri
2. Guru/Guru bantu
3. Mahasiswa KKN
4. Volunteer
5. Masyarakat yang concern di bidang pendidikan
6. Infrastruktur dan Sarpras yang dimiliki saat ini
7. Kurikulum/ materi yang digunakan saat ini

Keberadaan Aparatur Sipil Negara di perbatasan seperti tenaga pendidik yang sangat kurang membuat semua kalangan bergerak dan menjadikan sumber daya manusia yang ada di perbatasan membantu dalam kekurangan tenaga pendidik. TNI Polri membantu terutama di bidang nonformal, guru-guru bantu,



mahasiswa KKN, bahkan ada volunteer dari dompet dhuafa, dll yang bekerja tanpa imbalan untuk memajukan pendidikan daerah perbatasan.

Aspek *Cost Structure* yaitu penjelasan mengenai struktur-struktur biaya yang terlibat dan dikeluarkan dalam inovasi, yaitu difokuskan pada

1. Membangun sarpras/fasilitas/gedung yg lengkap dan nyaman
2. Membangun jalan menuju sekolah
3. Menyiapkan alat transportasi yg sesuai dgn kondisi geografis
4. Membangun sarana komunikasi yg memadai
5. Membangun budaya masyarakat
6. Mendorong kegiatan sosial-ekonomi masyarakat perbatasan
7. Menyiapkan kurikulum yg khas/ sesuai dgn kondisi perbatasan

Kenyataan dilapangan memang pembangunan sarana dan prasarana masih perlu banyak perbaikan, dan sangat tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya sehingga fokus struktur biaya harus difokuskan pada hal-hal tersebut diatas.

Aspek *Revenue streams* adalah hasil akhir / output akhir yang dapat dirasakan masyarakat, diantaranya

1. Pendidikan yg adil dan merata, sesuai dgn karakteristik daerah perbatasan
2. Meningkatnya kegiatan sosial-ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

3. SDM yg siap guna membangun perbatasan di masa mendatang
4. Peraturan/ kebijakan dari pemerintah pusat/ pemda
5. Sosial media/ media massa marketing

Daerah perbatasan pendidikannya masih jauh tertinggal, kegiatan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan berdampak baik bila pendidikannya maju. Pendidikan yang baik juga mendorong SDM siap guna dalam partisipasi membangun masyarakat. Karna pendidikan masih tertinggal maka semua hal tersebut saat ini masih belum dirasakan oleh masyarakat perbatasan.

Melalui *Canvas template innovation* ini maka dapat terlihat bahwa inovasi-inovasi pendidikan yang telah ada saat ini diperbatasan seperti sekolah tapal batas, sekolah filial serta sarjana mengajar merupakan bibit-bibit inovasi yang harus terus dibina, didukung dan dimunculkan lagi agar dapat menyelesaikan permasalahan pendidikan yang ada diperbatasan. Inovasi-inovasi baru lainnya diperlukan sesuai dengan karakteristik permasalahan yang ada di daerah perbatasan tersebut.

Keterkaitan antara masalah pendidikan di perbatasan dengan inovasi pendidikan yang diajukan serta ekspektasi yang diharapkan terjadi jika inovasi tersebut dilaksanakan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel. 2
Keterkaitan masalah dengan inovasi dan dampak yang diharapkan

Masalah	Inovasi Pendidikan	Kondisi yang Diharapkan
Kurangnya tenaga Pendidik baik kualitas maupun kuantitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi penyuluh (pertanian) & TNI sebagai tenaga guru tambahan/ bantu 2. memanfaatkan guru-guru ngaji/ pendeta desa, kelompok karang taruna desa, dukun, bidan sebagai guru bagi anak-anak di desanya (<i>team teaching</i>) 3. Memanfaatkan anak didik yang telah menduduki kelas yang lebih tinggi untuk membantu mengajari anak didik dengan kelas yang lebih rendah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik sekaligus dapat menginspirasi masyarakat 2. Memenuhi kebutuhan guru dan menginspirasi anak didik 3. Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dasar, Memotivasi adik kelas agar mampu mengajari adik kelasnya lagi



Masalah	Inovasi Pendidikan	Kondisi yang Diharapkan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi penyuluh (pertanian) & TNI sebagai tenaga guru tambahan/ bantu 2. memanfaatkan guru-guru ngaji/ pendeta desa, kelompok karang taruna desa, dukun, bidan sebagai guru bagi anak-anak di desanya (<i>team teaching</i>) 3. Memanfaatkan anak didik yang telah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik sekaligus dapat menginspirasi masyarakat 2. Memenuhi kebutuhan guru dan menginspirasi anak didik 3. Memenuhi kebutuhan tenaga
Sarpras/fasilitas pendidikan yang Minim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jauhnya jarak antar sekolah mendorong perlunya dibentuk sekolah darurat pada desa-desa yang berdampingan. Jika sebelumnya anak didik yang mendatangi sekolah, maka kali ini sekolah yang mendatangi peserta didik. Jika memungkinkan memanfaatkan kantor desa/ kecamatan yang berdekatan sebagai sekolah darurat.(penggabungan UN) 2. Terbatasnya buku-buku diperbatasan dapat ditanggulangi dengan menghimpun bantuan pengadaan buku bagi sekolah-sekolah diperbatasan dari CSR perusahaan-perusahaan 3. Menghimpun dana CSR atau dana publik lainnya. 4. Mendorong fasilitas internet masuk perbatasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat dipelosok daerah perbatasan dapat mendapatkan pendidikan secara menyeluruh 2. Agar buku-buku sekolah bisa lebih banyak dan pengetahuan anak didik semakin luas dengan banyaknya koleksi buku. 3. untuk mendorong peningkatan fasilitas pendidikan diperbatasan (sekolah swasta, dll) 4. Internet memudahkan komunikasi dan informasi sehingga daerah perbatasan tidak tertinggal.
Kurikulum yang kurang sesuai dengan keadaan geografis dan daerah perbatasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. diberikan kewenangan/ otonomi kepada dinas pendidikan di wilayah perbatasan. 2. kurikulum pengajaran di perbatasan lebih kepada peningkatan pengetahuan dasar (baca, tulis, hitung), cinta tanah air, serta praktek berusaha seperti bertani, nelayan, berkebun (non-academic skill). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. untuk mendesain kurikulum yang sesuai dengan karakteristik perbatasan, relatif begitupula dengan penilaiannya. 2. Pengetahuan dasar dan kurikulum berbasis muatan lokal yang sesuai dengan karakteristik daerah perbatasan mampu mempercepat kemajuan pendidikan dari ketertinggalan
Keberadaan TKI di perbatasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan/ Kewenangan/ kebijakan menghadapi masalah pendidikan anak TKI diberikan kepada daerah 2. Sekolah Asrama bagi anak- anak TKI yang sekolah di perbatasan 3. Angkutan pelajar bagi anak-anak TKI yang akan belajar di wilayah perbatasan 4. Paket kurikulum khusus untuk anak-anak TKI yang sekolah di perbatasan dengan mengutamakan pelajaran nilai kebangsaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar Pemerintah daerah mempunyai payung hukum yang jelas dalam menangani masalah-masalah TKI di perbatasan terutama di bidang pendidikan 2. Mempermudah anak TKI untuk bersekolah tidak harus berjalan jauh, lebih fokus untuk belajar di sekolah ayang berasrama 3. Mempermudah anak TKI untuk bersekolah tidak harus berjalan jauh



E. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari berbagai latar belakang fenomena-fenomena pendidikan di perbatasan, dikaitkan dengan teori dan temuan hasil lapangan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga inovasi yang ada di lokus penelitian yaitu Sekolah Tapal Batas, Sekolah Filial dan juga Sarjana mengajar, ketiganya dikategorikan inovasi karena memenuhi unsur kebaruan dan kemanfaatan sebagai syarat utama sebuah inovasi.

Kekuatan dan kunci sukses inovasi pendidikan yang dimiliki oleh perbatasan sebagai modal peningkatan pendidikan bisa dilihat dari keadaan-keadaan di daerah perbatasan :

1. Desa : terdapat alokasi Dana Desa, masih banyaknya dukun, terdapat tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, karang taruna, puskesmas, kantor desa, dan adanya TNI sampai ke desa.
2. Kecamatan : terdapat Sekolah, Kantor Kecamatan, Puskesmas, Penyuluh, dan TNI
3. Perbatasan: hutan, tidak ada akses jalan, tidak ada listrik, jauh, terbatas jumlah penduduk, usaha (bertani, nelayan, berkebun)

Berdasarkan permasalahan yang ada di daerah perbatasan dapat disimpulkan bahwa keadaan di daerah perbatasan yang berhubungan dengan pendidikan adalah:

1. Guru yang minim baik secara kualitas maupun kuantitas
2. Transportasi umum tidak ada, Minim fasilitas dan sarana prasarana pendidikan.
3. Kurikulum yang kurang sesuai dengan daerah perbatasan dan juga keadaan geografis penduduk.
4. Anak tidak mampu dari keluarga TKI yang bersekolah di perbatasan Indonesia

F. REKOMENDASI

Dari berbagai fenomena dan permasalahan tersebut maka dapat

diberikan berbagai macam solusi inovasi pendidikan bagi peningkatan pendidikan di daerah perbatasan, diantaranya:

Lingkup Guru, Siswa dan sosial masyarakat

1. Optimalisasi penyuluh (pertanian) & TNI sebagai tenaga guru tambahan/bantu. Penyuluh & TNI dapat menjangkau wilayah pelosok di perbatasan. Kurangnya jumlah guru kiranya dapat ditutupi dengan peran penyuluh (pertanian) dan TNI yang nantinya berperan sebagai guru tambahan/bantu.
2. Selain itu, juga dapat memanfaatkan guru-guru ngaji/ pendeta desa, kelompok karang taruna desa, dukun, bidan sebagai guru bagi anak-anak di desanya (*team teaching*). Tentu ini diperlukan pelatihan, adanya ADD relatif dapat menutupi kebutuhan operasional pihak-pihak tersebut.
3. Kurangnya jumlah siswa pada kelas yang sama, dapat diatasi dengan membentuk kelas tanpa jenjang (*multiage class*). Pada kelas ini akan diajarkan mata pelajaran atau pengetahuan yang bersifat umum.
4. Memanfaatkan anak didik yang telah menduduki kelas yang lebih tinggi untuk membantu mengajari anak didik dengan kelas yang lebih rendah. Hal ini untuk mengatasi keterbatasan jumlah guru yang ada
5. Mendorong pelaksanaan KKN universitas di wilayah perbatasan dalam rangka memajukan wilayah perbatasan
6. Program orang tua asuh untuk menjamin kelangsungan pendidikan anak didik di perbatasan (*reduce the drop outs*)
7. Menerapkan sistem sekolah asrama bagi anak didik perbatasan yang cukup jauh domisilinya dari sekolah yang ada
8. Merekrut masyarakat diperbatasan untuk dipekerjakan sebagai guru, dengan insentif yang cukup tinggi



9. Program semacam Koas bagi mahasiswa FKIP di Kaltim dan Kaltara untuk jalur sepanjang perbatasan dapat difasilitasi dengan ADD atau CSR
10. Kampanye/promosi pendidikan di perbatasan ke universitas untuk membangun jaringan pendidikan non formal berorientasi pendidikan dasar Baca Tulis hitung
11. Bagi Pemerintah adalah dengan membuat kebijakan peruntukan alokasi ADD untuk pendidikan

Lingkup Fasilitas

1. Jauhnya jarak antar sekolah mendorong perlunya dibentuk sekolah darurat pada desa-desa yang berdampingan. Jika sebelumnya anak didik yang mendatangi sekolah, maka kali ini sekolah yang mendatangi peserta didik. Jika memungkinkan memanfaatkan kantor desa/kecamatan yang berdekatan sebagai sekolah darurat.(penggabungan UN)
2. Terbatasnya buku-buku diperbatasan dapat ditanggulangi dengan menghimpun bantuan pengadaan buku bagi sekolah-sekolah diperbatasan dari CSR perusahaan-perusahaan. Atau mendorong siswa di sekolah-sekolah perkotaan untuk menyumbangkan buku-buku pelajaran ketika mereka tamat. Begitu juga dengan kelengkapan/ fasilitas lainnya seperti pakaian sekolah, alat praktek lab, dll.
3. Menghimpun dana CSR atau dana publik lainnya untuk mendorong peningkatan fasilitas pendidikan diperbatasan (sekolah swasta, dll)
4. Mendorong fasilitas internet masuk perbatasan

Lingkup Kurikulum Pengajaran

1. Pada wilayah perbatasan sebaiknya pengajaran tidak mengacu pada kurikulum yang dibentuk secara nasional, namun diberikan

kewenangan/ otonomi kepada dinas pendidikan di wilayah perbatasan untuk mendesain kurikulum yang sesuai dengan karakteristik perbatasan, relatif begitu pula dengan penilaiannya.

2. Sebaiknya kurikulum pengajaran di perbatasan lebih kepada peningkatan pengetahuan dasar (baca, tulis, hitung), cinta tanah air, serta praktek berusaha seperti bertani, nelayan, berkebun (*non-academic skill*). Dengan upaya ini, selain proses belajar dapat dijalankan optimal oleh siswa, juga dapat meningkatkan kapasitas siswa dalam membantu perekonomian keluarganya (perubahan *mindset*)

Daftar Pustaka

- Asriati, Nuraini. 2013. *Pengembangan Model Pendidikan Menengah "Sekolah Kebangsaan" di Daerah Terpencil, Tertinggal, Terluar dan Perbatasan Kalimantan Barat-Serawak Malaysia*. Prosiding Seminar Nasional 2013 Menuju Masyarakat Madani dan Lestari
- Brahmantiyo, Anjar Utomo. 2007. *Pelayanan Sarana Pendidikan di Kawasan Perbatasan Semarang-Demak, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota*. Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- Deputi Inovasi Administrasi Negara. 2015. *Memahami Organisasi Dengan Canvas Model*. Seri Administrasi Negara No 2. Slide share.
- Dirjen Dikti kementerian Pendidikan dan kebudayaan. Rencana Strategis Dirjen Dikti Tahun 2010-2014.
- Ibrahim. 1988. *Inovasi Pendidikan*. Jakarta : Depdikbud
- Ibrahim. 1988. *Inovasi Pendidikan*. Jakarta : Depdikbud
- Jero Budi Darmayasa & Woro Kusmaryani, 2015. *Pengenalan Lesson Study*



- Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara - Malaysia. *Jurnal Borneo Tarakan*. Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat di Wilayah Perbatasan. Available online at <http://www.uui.ac.id/content/view/3340/257/>. Diakses Tanggal 13 Agustus 2015
- UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Wahyudi. 2014. Model Pemberdayaan Masyarakat Dayak Pedalaman Dalam Bidang Pendidikan Sebagai Upaya Percepatan Askse Pendidikan. *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan*. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=299159&val=2347&title=MODEL%20PEMBERDAYAAN%20MASYARAKAT%20DAYAK%20PEDALAMAN%20DALAM%20BIDANG%20PENDIDIKAN%20SEBAGAI%20UPAYA%20PERCEPATAN%20AKSES%20PENDIDIKAN>, diakses tanggal 14 Agustus 2015
- Zakso, Amri. 2010. Inovasi Pendidikan di Indonesia Antara Harapan dan Kenyataan. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora Vol1 No1* Zein, Yahya Ahmad. (2015).

